

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Informan

Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan. Peneliti menggunakan sampel purposif (*purposive sampling*) yang didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas mengenai strategi komunikasi yang diterapkan di BPBD Provinsi Lampung dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti maka informan yang dipilih yaitu:

1. Bapak Joni Tambunan S.H (Informan 1), selama 1 tahun ini menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan yang bertanggung jawab secara langsung mengkoordinasi seluruh perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi di BPBD Provinsi Lampung. Wawancara dilakukan di BPBD tanggal 28 Juni 2010, yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 20 Agustus 2010, Bapak berusia 43 tahun ini merupakan individu yang ramah, cekatan dan sabar. Beliau menyelesaikan gelar sarjananya di Fakultas Hukum. Sebelum ditempatkan di BPBD, beliau bertugas di Pemda Kabupaten Lampung Tengah.

2. Bapak Drs. AGP. Madiono (Informan 2), adalah Kepala Sub Bidang Pencegahan yang telah menjabat selama kurang lebih 3 tahun. Pak Madiono sering ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan BPBD Provinsi Lampung. Wawancara dilakukan di BPBD Provinsi Lampung

tanggal 28 Juni 2010 dan dilanjutkan tanggal 20 Agustus 2010, informan yang berusia 45 tahun ini bergelar Sarjana Administrasi Negara, beliau memiliki motivasi yang besar dalam membantu korban bencana. Beliau termasuk individu yang tergolong terbuka dan demokratis dalam menyampaikan informasi yang beliau ketahui mengenai penanggulangan bencana.

3. Bapak Drs.Fajar Isnawan (Informan 3), meskipun beliau terbilang baru yakni, ± 6 bulan, berada di BPBD Provinsi Lampung, namun beliau sudah cukup memahami tentang strategi komunikasi yang dijalankan BPBD Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Bencana. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Wawancara dengan beliau dilakukan pada tanggal 28 Juni 2010 dan dilanjutkan tanggal 20 Agustus 2010. Bapak yang memakai kaca mata ini merupakan individu yang ramah, tegas, dan demokratis. Sebelum ditempatkan di BPBD Provinsi Lampung, beliau lebih dulu ditugaskan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung. Beliau merupakan lulusan Sastra Inggris. Di waktu senggangnya beliau juga menyempatkan mengajar di FISIP Universitas Lampung.

4. Bapak Wisnu S.Sos (Informan 4), merupakan orang yang juga lumayan lama di BPBD. Beliau menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dengan pangkat golongan III-d. Bapak berusia 48 tahun ini merupakan individu yang ramah dan kritis. Beliau merupakan Sarjana Komunikasi yang mengabdikan diri kepada negara dengan sebaik-baiknya. Wawancara dilakukan dengan Bapak yang berambut cepak ini pada tanggal 28 Juni 2010 dan dilanjutkan 20 Agustus 2010.

## **B. Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana strategi komunikasi yang digunakan BPBD Provinsi Lampung dalam penanggulangan bencana banjir. Strategi komunikasi tersebut menyangkut pola komunikasi yang diterapkan BPBD dalam penyampaian pesan penanggulangan bencana banjir ke masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan pada bab empat, pola komunikasi yang diterapkan BPBD Provinsi Lampung dalam penyampaian pesan penanggulangan bencana banjir adalah bekerjasama dengan badan atau unsur terkait lainnya dalam melakukan sosialisasi atau pelatihan penanggulangan bencana banjir ke masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan banjir.

Selain itu kegiatan tersebut juga didukung oleh adanya pembuatan *brosur atau pamflet*, poster, *billboard* peta daerah rawan dan jalur evakuasi, pemasangan rambu-rambu, dan pengadaan EWS (*Early Warning Sistem*) yang bekerja sama dengan BMKG. Berikut hasil wawancara dengan keempat informan yang berhasil penulis kumpulkan :

### **a. Strategi Komunikasi**

Strategi komunikasi pada dasarnya adalah suatu cara, metode, maupun teknik yang menyeluruh dari rangkaian tindakan didalam satu proses berkomunikasi yang dirancang untuk mendapatkan hasil efektif yang diinginkan dari proses komunikasi tersebut. Berikut pertanyaan yang penulis ajukan kepada keempat informan:

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan didalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau pelatihan penanggulangan bencana banjir?

Maka jawaban dari informan adalah:

Informan 1:

“Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah berupa *workshop* mengenai tata cara penanggulangan bencana banjir, pelatihan atau simulasi kesiapsiagaan, dan ajakan ke masyarakat untuk menjaga lingkungannya.”(Wawancara 20 Agustus 2010)

Informan 2:

“Didalam sosialisasi penanggulangan bencana banjir ini, kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan, pemberian informasi tentang tata cara menanggulangi bencana banjir, serta kiat-kiat yang bila dilakukan apabila menghadapi bencana banjir.” (Wawancara 20 Agustus 2010)

Analisis Penulis:

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi bencana banjir ini adalah berupa kegiatan *workshop* mengenai tata cara penanggulangan bencana banjir yang disertai dengan pelatihan atau simulasi kesiapsiagaan terhadap bencana banjir tersebut, dan mengarahkan masyarakat untuk lebih menjaga lingkungannya.

2. Apa saja yang perlu dipersiapkan di dalam merancang kegiatan sosialisasi atau pelatihan penanggulangan banjir tersebut?

Maka jawaban yang diperoleh dari Informan yaitu:

Informan 1:

” Yang perlu dipersiapkan adalah pertama, kami mengadakan rapat internal guna mengadakan konsultasi pada masing-masing bidang yang mengacu kepada Tupoksi ( Tugas Pokok dan Fungsi) BPBD Provinsi Lampung, yang didasarkan pada kebutuhan dan situasi saat itu agar efektif dan efisien dalam penerapannya. Setelah keputusan telah diperoleh maka kami mengadakan rapat koordinasi dengan satuan kerja lembaga terkait dengan penanggulangan bencana banjir, seperti BMKG, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, PU, Kepolisian, serta pihak-pihak terkait lainnya, disini diputuskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana banjir

tersebut, siapa saja pihak yang akan diundang, media yang digunakan, serta pemilihan tempat sosialisasi dan anggaran dana yang akan dikeluarkan.” (Wawancara 20 Agustus 2010)

#### Analisis Penulis:

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana banjir tersebut adalah yang pertama, BPBD mengadakan rapat internal guna mengadakan konsultasi pada masing-masing bidang yang mengacu kepada Tupoksi ( Tugas Pokok dan Fungsi) BPBD Provinsi Lampung. Selanjutnya BPBD mengadakan rapat koordinasi dengan satuan kerja lembaga terkait dengan penanggulangan bencana banjir, seperti BMKG, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, PU, Kepolisian, serta pihak-pihak terkait lainnya, disini diputuskan bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana banjir tersebut, jadwal kegiatannya, siapa saja pihak yang akan diundang, media apa yang digunakan dalam menunjang kegiatan tersebut,serta pemilihan tempat sosialisasi dan anggaran dana yang akan dikeluarkan.

3. Bagaimana proses pembagian kerja didalam kegiatan sosialisasi atau pelatihan penanggulangan bencana banjir ke masyarakat?

Maka jawaban yang diperoleh dari Informan 1, yaitu:

” Proses pembagian kerja itu dimulai dari ditunjuknya PPTK( Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) kemudian pada saat kegiatan tersebut akan dilaksanakan, maka dibentuklah panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari Ketua Pelaksana, Sekertaris, dan anggota. Disini juga ditentukan siapa saja yang akan menjadi pembicara dalam sosialisasi tersebut.” (Wawancara 28 Juni 2010).

Analisis Penulis:

Menurut informan, pembagian kerja atau tugas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di BPBD dan Satker membentuk PPTK ( Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) yang kemudian pada saat kegiatan tersebut akan dilaksanakan, maka dibentuklah panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari Ketua Pelaksana, Sekertaris, anggota serta siapa saja yang bertugas sebagai pembicara dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

4. Apa manfaat kegiatan sosialisasi atau pelatihan penanggulangan bencana banjir tersebut bagi masyarakat?

Jawaban dari informan:

Informan 1:

“Kegiatan ini bermanfaat dalam memberikan informasi meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan peran serta masyarakat dalam perlindungan terhadap ancaman bencana bajir yang akan terjadi dimasa datang.” (Wawancara 28 Juni 2010)

Informan 2:

“Kegiatan ini bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai penanggulangan bencana banjir ke masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan kesiapan bagi semua pihak dalam menghadapi kemungkinan situasi bencana banjir di masa yang akan datang.” (Wawancara 28 Juni 2010)

Informan 3:

“Kegiatan ini bermanfaat dalam memberikan info-info mengenai penanggulangan bencana banjir ke masyarakat.” (Wawancara 28 Juni 2010)

Informan 4:

“Kegiatan ini bermanfaat dalam memberikan info-info mengenai penanggulangan bencana banjir ke masyarakat sehingga masyarakat dapat siap siaga dalam menghadapi bencana banjir di masa yang akan datang.” (Wawancara 28 Juni 2010)

Analisis Penulis:

Menurut keempat informan, kegiatan strategi komunikasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam menyampaikan informasi tentang penanggulangan bencana banjir, sehingga diharapkan dapat memberikan kesiapan bagi semua pihak dalam menghadapi kemungkinan situasi bencana banjir di masa yang akan datang.

5. Apakah pentingnya kegiatan mensosialisasikan penanggulangan bencana banjir tersebut bagi BPBD Provinsi Lampung?

Jawaban dari informan:

Informan 1

“Kegiatan ini sangatlah penting, karena dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan dan peran serta masyarakat dalam perlindungan terhadap ancaman bencana yang terjadi. Sehingga dapat memperkecil, mengurangi, meminimalisir bencana banjir.” (Wawancara 28 Juni 2010)

Informan 2

“Tentunya sangat penting karena dengan adanya kegiatan ini, secara tidak langsung akan meminimalisir, mengurangi, memperkecil dampak atau akibat kejadian suatu bencana banjir.” (Wawancara 28 Juni 2010)

Informan 3

“Menurut saya semua kegiatan yang dijalankan ini sangat penting, karena semua kegiatan memiliki hubungan atau kolerasi dari semua kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir.” (Wawancara 28 Juni 2010)

Informan 4

“Kegiatan sosialisasi ini sangatlah penting, karena diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, masyarakat dalam perlindungan terhadap ancaman bencana banjir yang terjadi.” (Wawancara 28 Juni 2010)

Analisis Penulis:

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keempat informan sependapat kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana bagi BPBD sangatlah penting karena semua rangkaian kegiatan didalamnya memiliki hubungan atau kolerasi bagi kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir. Dengan adanya kegiatan ini maka secara tidak langsung akan meminimalisir, mengurangi, dan memperkecil dampak atau akibat suatu bencana, karena kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana yang akan terjadi.

**b. Identifikasi/Segmentasi Khalayak**

1. Siapa sajakah sasaran BPBD saat ini dan apa harapan BPBD dimasa yang akan datang?

Jawaban dari informan:

a. Informan 1

“Segmentasi atau sasaran BPBD yang paling mendasar adalah masyarakat, khususnya masyarakat yang berada didaerah rawan bencana banjir. Harapannya ialah terwujudnya kesadaran, dan peran serta masyarakat dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut. Serta terciptanya koordinasi yang baik dan sepaham dengan pihak/ instansi terkait sehingga penanggulangan bencana banjir dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. BPBD memiliki segmentasi khusus dalam melakukan sosialisasi seperti bencana banjir, BPBD mengundang sejumlah masyarakat yang berada di daerah yang wilayahnya sering terkena banjir, seperti masyarakat di daerah rendah.” (Wawancara 28 Juni 2010).

b. Informan 2

“Tentu saja sasaran atau segmentasi dari kegiatan ini adalah masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan banjir. Harapannya masyarakat menjadi sadar dan mau menjaga lingkungannya agar ancaman bencana banjir bisa diminimalisir.” (Wawancara 28 Juni 2010)

c. Informan 3

“Masyarakat yang tinggal diderah rawan bencana banjir seperti daerah dataran rendah, daerah bantaran kali atau sungai kecil, serta satuan kerja terkait, yang ikut ambil andil dalam penanggulangan bencana. Harapannya adalah masyarakat akan semakin sadar, akan perlindungan terhadap ancaman bencana banjir yang juga didukung oleh mantapnya satuan perlindungan masyarakat dan manajemen penanggulangan bencana.” (Wawancara 28 Juni 2010).

d. Informan 4

“Sasaran dilaksanakannya kegiatan ini adalah masyarakat didaerah rawan bencana banjir. Harapannya adalah terwujudnya kesadaran, kemampuan, dan peran serta masyarakat dalam perlindungan terhadap ancaman bencana banjir.” (Wawancara 28 Juni 2010).

Analisis Penulis:

Segmentasi atau sasaran dari kegiatan sosialisasi bencana banjir ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana banjir, seperti daerah dataran rendah dan daerah bantaran kali atau sungai. Berdasarkan hasil wawancara dari informan, harapan BPBD dimasa yang akan datang dengan dilaksanakannya kegiatan strategi komunikasi tersebut adalah terwujudnya kesadaran, kemampuan, dan peran serta masyarakat dalam perlindungan terhadap ancaman bencana banjir, yang didukung oleh adanya system informasi kesiagaan dan mantapnya sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat melalui manajemen penanggulangan bencana banjir, serta terciptanya koordinasi yang baik dan sepaham dengan pihak/ instansi terkait sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

**c. Ketersediaan Dana dan Fasilitas**

1. Bagaimana ketersediaan dana dan fasilitas didalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi penanggulangan banjir tersebut?
2. Siapakah yang menyediakan dana dan fasilitas tersebut?

Maka hasil wawancara yang diperoleh yaitu:

Informan 1:

“Karena BPBD Provinsi Lampung masih tergolong lembaga yang baru, jadi sarana dan finansial pun masih terbilang kurang terutama masalah kendaraan. Sehingga masih membutuhkan aliran bantuan dari pusat atau BNPB dan Pemerintah Provinsi melalui APBD.” (Wawancara 28 Juni 2010)

Informan 2:

“Sebenarnya anggaran dana serta sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD masih terbilang kurang, karena BPBD masih mendapatkan aliran bantuan dari pusat maupun serta dari anggaran pendapatan belanja daerah.” (Wawancara 28 Juni 2010)

Informan 3:

“Sebenarnya anggaran dana dan sarana masih bisa dibilang belum cukup memadai, tapi setidaknya anggaran dan sarana tersebut sudah cukup mendukung kegiatan yang dilakukan BPBD. Untuk masalah finansial dan sarana pelaksana kegiatan, jujur kami masih memperoleh bantuan dari pemerintah pusat (BNPB) dan pemerintah daerah (APBD).” (Wawancara 28 Juni 2010)

Informan 4:

“Untuk masalah finansial dan sarana pelaksana kegiatan, jujur kami masih memperoleh bantuan dari pemerintah pusat (BNPB) dan pemerintah daerah (APBD).” (Wawancara 28 Juni 2010)

#### Analisis Penulis:

Menurut informan, sarana yang dimiliki BPBD Provinsi Lampung masih seadanya bahkan terbilang kurang, namun sarana dan anggaran tersebut cukup mendukung kegiatan yang dilaksanakan BPBD. Kurangnya finansial dan sarana ini disebabkan karena BPBD masih terbilang lembaga baru, sehingga masih butuh banyak bantuan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat melalui BNPB maupun pemerintah daerah melalui APBD.

#### d. Media

1. Media apa saja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi penanggulangan bencana banjir tersebut?

Hasil wawancara yang diperoleh:

Informan 1

“Media yang digunakan untuk mendukung jalannya kegiatan ini adalah brosur, *pamflet*, poster, *billboard*, dan pengadaan EWS (*Early Warning Sistem*) yang bekerja sama dengan BMKG.” (Wawancara 20 Agustus 2010)

Informan 2

“Media yang mendukung adalah media cetak seperti brosur, poster, *pamflet*, dan media elektronik seperti *Early Warning System* (EWS), disini kami bekerja sama dengan BMKG dalam memberikan informasi cepat mengenai adanya cuaca ekstrim yang datang, yang memungkinkan terjadinya bencana banjir, dalam hal ini kami dibantu oleh *provider* telekomunikasi seperti *Indosat* dan *Telkomsel*. Jadi begitu ada informasi tentang cuaca ekstrim yang terjadi, para *provider* tersebut akan memberikan informasi langsung ke masyarakat melalui *Short Message Service* (SMS).” (Wawancara 20 Agustus 2010)

Informan 4

“Media yang mendukung adalah seperti poster dan brosur waspada bencana banjir yang isinya tentang macam-macam tata cara penanggulangan bencana banjir, serta spanduk yang berisikan informasi adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan BPBD Provinsi Lampung.” (Wawancara 20 Agustus 2010)

#### Analisis Penulis:

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa keempat informan menyebutkan macam-macam media yang membantu kegiatan strategi komunikasi yang dilakukan BPBD Provinsi Lampung, media yang mendukung kegiatan tersebut, diantaranya : brosur, *pamflet*, poster, *billboard*, dan pengadaan EWS (*Early Warning Sistem*) yang bekerja sama dengan BMKG. Media brosur dan *pamflet* ini biasanya dibagikan pada masyarakat pada saat kegiatan sosialisasi

penanggulangan bencana banjir. Sedangkan pada media poster, hanya ditempelkan disekitar area sosialisasi.

2. Seperti apakah rancangan pesan yang digunakan pada media tersebut?

Hasil wawancara yang diperoleh:

Informan 1

“Isi pesannya mengenai tata cara atau tindakan yang dilakukan jika terjadi banjir.”  
(Wawancara 20 Agustus 2010)

Informan 2

“Mungkin bisa langsung dilihat pada brosur atau poster, yang sudah ada.”  
(Wawancara 20 Agustus 2010)

Informan 4

“Seperti yang tadi saya utarakan, isinya tentang macam-macam tata cara penanggulangan bencana banjir, serta spanduk yang berisikan informasi adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan BPBD Provinsi Lampung.”(Wawancara 20 Agustus 2010)

#### Analisis Penulis:

Menurut hasil wawancara dengan informan, media pendukung seperti brosur atau *pamflet*, berisikan pesan tentang penyebab banjir, tata cara yang dilakukan pada saat banjir, serta cara mengurangi dampak banjir. Sedangkan media poster berisikan pesan tentang waspada banjir. Sebenarnya dalam pembuatan poster ini, BPBD masih dibantu oleh BNPB ( dulunya BAKORNAS Penanggulangan Bencana). Akan tetapi BPBD sekarang sedang dalam tahap proses pembuatan brosur, pamflet dan brosur sendiri. Penggunaan warna yang mencolok dan tampilan *lay-out* yang menarik pada media brosur, pamflet, dan poster ini, dimaksudkan agar masyarakat tertarik untuk membacanya.

**e. Masalah atau Hambatan**

1. Adakah hambatan yang dialami BPBD Provinsi Lampung dalam melaksanakan kegiatan strategi komunikasi tersebut? Sebutkan!

Hasil wawancara yang diperoleh:

Informan 1

“Hambatan yang dialami BPBD Provinsi Lampung dalam kegiatan mensosialisasikan penanggulangan bencana banjir adalah anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana yang belum cukup memadai, serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu perubahan personel yang begitu cepat di dalam sistem kerja pemerintah, sehingga perlunya penyesuaian kerja kembali apabila terjadi perubahan personel atau bidang kerja.” (Wawancara 28 Juni 2010).

Informan 2

“Tentu saja dalam menjalankan suatu rencana kegiatan pasti mengalami kendala atau hambatan. Hambatan dan kendala yang kami alami itu adalah dana , sarana dan prasarana yang terbatas, serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.” (Wawancara 28 Juni 2010).

Informan 3

“Hambatan yang dialami BPBD Provinsi Lampung dalam penanggulangan bencana adalah perubahan personel yang begitu cepat di dalam sistem kerja pemerintah, sehingga perlunya penyesuaian kerja kembali apabila terjadi perubahan personel atau bidang kerja. Selain itu anggaran yang bisa dikatakan kurang.” (Wawancara 28 Juni 2010).

Informan 4

“Hambatan dan kendala yang kami alami itu adalah dana , sarana dan prasarana yang terbatas, serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.” (Wawancara 28 Juni 2010)

Uraian Penulis:

Menurut hasil wawancara, didalam melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut pihak BPBD memiliki kendala atau hambatan seputar pengadaan dana dan fasilitas. Karena tidak mengherankan, didalam membuat suatu kegiatan dibutuhkan dana yang lumayan besar serta fasilitas yang memadai, seperti

kendaraan untuk sosialisasi, tempat sosialisasinya, alat-alat yang digunakan dalam simulasi, dan sebagainya. Keterbatasan-keterbatasan tersebutlah yang menyebabkan BPDB belum bisa menjangkau semua masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk bisa diundang atau ikut dalam kegiatan sosialisasi.

#### **f. Respon Publik**

1. Bagaimana BPBD Provinsi Lampung mengidentifikasi respon publik terhadap kegiatan yang telah terlaksana?

Hasil wawancara yang diperoleh:

Informan 1:

“Dalam mengidentifikasi respon publik, biasanya dilihat dari antusias masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, itu terbukti dengan banyaknya masyarakat yang sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan seperti sosialisasi dan pelatihan tersebut. Karena dengan adanya kegiatan yang dilakukan BPBD tersebut, masyarakat menjadi semakin mengerti akan pentingnya perlindungan terhadap berbagai macam ancaman bencana yang terjadi.” (Wawancara 28 Juni 2010)

Informan 2:

“Biasanya kami mengadakan peninjauan ulang ke daerah-daerah yang diundang dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan banjir tersebut.” (Wawancara 28 Juni 2010).

Informan 3:

“Cara kami mengidentifikasi respon publik adalah dengan mengadakan peninjauan ulang ke daerah-daerah yang diundang dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan banjir tersebut. Kami akan menanyakan kepada masyarakat di daerah tersebut apakah pesan penanggulangan tersebut telah sampai ke mereka atau belum.” (Wawancara 28 Juni 2010).

Informan 4:

“Setelah mengadakan suatu kegiatan sosialisasi, biasanya kami mengadakan peninjauan ulang ke daerah-daerah yang kami undang tersebut, apakah pesan yang dimaksud telah sampai, atau belum.” (Wawancara 28 Juni 2010)

Analisis Penulis:

Didalam mengidentifikasi respon masyarakat, BPBD biasanya mengadakan peninjauan kembali ke daerah-daerah yang diundang dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui apakah pesan dari kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana banjir tersebut telah sampai atau tidak ke masyarakat

Berikut tabel *display* reduksi data yang akan mempermudah dalam melihat hasil wawancara dengan informan dari BPBD Provinsi Lampung:













### C. Pembahasan

Strategi Komunikasi BPBD Provinsi Lampung adalah keterampilan pihak BPBD dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan pesan penanggulangan bencana banjir kepada masyarakat. Berdasarkan pra riset yang dilakukan penulis, strategi komunikasi yang dilakukan adalah berupa kegiatan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana banjir kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir. Sosialisasi ini melibatkan pihak BPBD Kabupaten/Kota serta *key persons* yang ada di wilayah tersebut, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat desa.

Sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana banjir ini merupakan sarana untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana penanggulangan bencana banjir. Hal ini sangat diperlukan agar masyarakat paham karakteristik bencana bencana banjir di wilayahnya, dan hal apa saja yang seharusnya dilakukan sebelum terjadinya bencana banjir, pada saat kejadian, dan pasca bencana, serta dilengkapi dengan simulasi keadaan darurat.

Didalam pembahasan ini, penulis mencoba menjabarkan strategi komunikasi yang dilakukan BPBD Provinsi Lampung diatas ke dalam Teori POAC (*Planning, Organizing, Actuating , dan Controlling*) yang dikemukakan oleh George R Terry. Maka deskripsi penelitian ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana banjir tersebut.

## 1. Perencanaan (*Planning*)

Didalam melaksanakan suatu kegiatan, seperti sosialisasi penanggulangan bencana banjir ini, terlebih dahulu harus memiliki suatu perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan yang lebih dulu harus dilakukan agar suatu rencana dapat berjalan dengan teratur. Menurut informan, langkah pertama yang dilakukan BPBD Provinsi Lampung adalah mengadakan rapat internal guna mengadakan konsultasi pada masing-masing bidang yang mengacu kepada Tupoksi ( Tugas Pokok dan Fungsi) BPBD Provinsi Lampung, yang didasarkan pada kebutuhan dan situasi saat itu agar efektif dan efisien dalam penerapannya.

Setelah keputusan telah diperoleh maka selanjutnya pihak BPBD mengadakan rapat koordinasi dengan satuan kerja lembaga terkait dengan penanggulangan bencana banjir, seperti BMKG, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, PU, Kepolisian, serta pihak-pihak terkait lainnya, disini diputuskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana banjir tersebut, siapa segmentasinya, serta pemilihan tempat sosialisasi dan anggaran dana yang akan dikeluarkan.

Segmentasi atau sasaran BPBD yang paling mendasar adalah masyarakat, khususnya masyarakat yang berada didaerah rawan bencana banjir, seperti masyarakat di daerah dataran rendah ataupun masyarakat yang tinggal didaerah bantaran kali atau sungai kecil. Biasanya masyarakat tersebut diwakilkan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat desa. Selain itu, segmentasi BPBD selanjutnya adalah pihak perwakilan dari masing-masing BPBD Kabupaten/Kota, seperti BPBD Kota Bandar Lampung, BPBD Tenggamus, dan BPBD Tulang

bawang. Dari perwakilan BPBD Kabupaten/Kota tersebut diharapkan pesan penanggulangan bencana banjir dapat sampai ke masyarakat khususnya di daerah rawan banjir kota Bandar Lampung.

Untuk kota Bandar Lampung, daerah rawan bencana banjir itu seperti daerah kecamatan Raja Basa, Tanjung Senang, Teluk Betung Utara, Panjang, Kemiling, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Tanjung Betung Selatan, Teluk Betung Barat, Kedaton, Sukarame, Tanjung Karang Barat, dan Sukabumi.

Harapan BPBD dimasa yang akan datang dengan dilaksanakannya kegiatan strategi komunikasi tersebut adalah terwujudnya kesadaran, kemampuan, dan peran serta masyarakat dalam perlindungan terhadap ancaman bencana banjir, yang didukung oleh adanya system informasi kesiagaan dan mantapnya sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat melalui manajemen penanggulangan bencana banjir, sehingga penanggulangan bencana banjir dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi komunikasi adalah ketersediaan dana dan fasilitas yang dimiliki lembaga. Pertimbangan dana memang dalam banyak hal menjadi yang paling utama, karena suatu kegiatan komunikasi, bagaimanapun juga pasti memerlukan biaya tertentu. Demikian pula fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu program komunikasi. Maksudnya, dalam hal ini adalah kemudahan-kemudahan dan perangkat sistem yang diperlukan untuk kegiatan yang dimaksud. Selain itu, pemilihan media juga menjadi salah satu faktor pendukung bagi suatu promosi strategi komunikasi. Pelaksanaan strategi komunikasi BPBD Provinsi Lampung tidak akan berjalan

dengan baik tanpa adanya dukungan fasilitas, media dan anggaran dana yang memadai.

Menurut informan, sarana yang dimiliki BPBD Provinsi Lampung masih seadanya bahkan terbilang kurang, namun sarana dan anggaran tersebut cukup mendukung kegiatan yang dilaksanakan BPBD. Kurangnya anggaran dana dan sarana ini disebabkan karena BPBD masih terbilang lembaga daerah baru, sehingga masih butuh banyak bantuan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya BPBD masih mengandalkan bantuan dari :

- a. Pemerintah Pusat, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), aliran dana dan sarana fasilitas tersebut disalurkan langsung ke BPBD Provinsi Lampung. Biasanya anggaran dana ini dipakai dalam pembiayaan rapat koordinasi antara BPBD Provinsi Lampung dan satuan kerja terkait dalam perumusan kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana banjir.
- b. Pemerintah Daerah, yaitu melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sumber anggaran lainnya seperti uang kas BPBD Provinsi Lampung. Anggaran dana ini digunakan dalam pembiayaan kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana banjir di tingkat provinsi.

Sedangkan untuk anggaran biaya yang dibutuhkan BPBD Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi didaerahnya, masing-masing dibebankan oleh APBD Kabupaten/Kota itu sendiri. Artinya BPBD Provinsi Lampung tidak bertanggung

jawab atas pembiayaan kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana banjir di masing-masing Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara, didalam pelaksanaan strategi komunikasi, BPBD Provinsi Lampung dibantu berbagai media yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung jalannya kegiatan strategi komunikasi, yaitu antara lain:

a. Media cetak, yang berupa brosur, *pamflet*, poster, dan *billboard*.

- Brosur dan *Pamflet* adalah surat selebaran atau poster kecil yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi massa. Perbedaan brosur dan *pamflet* adalah apabila terdiri dari satu halaman, brosur umumnya dicetak pada kedua sisi, dan dilipat dengan pola lipatan tertentu hingga membentuk sejumlah panel yang terpisah. Sedangkan *pamflet* hanya terdiri dari satu lembaran/halaman saja sehingga sering disebut lembar iklan.
- Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar.

Ketiga media diatas merupakan media pendukung dalam pelaksanaan strategi komunikasi BPBD Provinsi Lampung. Pada media brosur dan *pamflet*, berisikan pesan tentang penyebab banjir, tata cara yang dilakukan pada saat banjir, serta cara mengurangi dampak banjir. Sedangkan media poster berisikan pesan tentang waspada banjir serta rambu-rambu yang harus dilakukan sebelum atau pada saat banjir. Sebenarnya dalam pembuatan brosur ,*pamflet* dan poster ini, karena BPBD Provinsi Lampung masih terbilang lembaga/badan baru, sehingga BPBD masih dibantu oleh BNPB ( dulunya BAKORNAS Penanggulangan Bencana). Sehingga

informasi atau pesan yang diperoleh dari poster, pamflet, dan brosur tersebut masih merupakan standarisasi dari pusat. Akan tetapi BPBD berniat membuat sendiri media-media tersebut, dan saat ini masih dalam tahap proses pembuatan.

Penggunaan warna yang mencolok dan tampilan *lay-out* yang menarik dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti pada media brosur, pamflet, dan poster ini, dimaksudkan agar masyarakat tertarik untuk membacanya. Sebenarnya penggunaan media brosur, *pamflet*, dan poster dirasa tidak terlalu efektif, karena jangkauan khalayaknya relatif terbatas, karena penyebarannya hanya sebatas pada saat berlangsungnya sosialisasi penanggulangan bencana banjir dan pada saat mengikuti pameran-pembangunan saja.

- *Billboard*, merupakan media pendukung strategi komunikasi yang berisikan tentang peta daerah rawan bencana banjir dan peta jalur evakuasi banjir. Pemetaan daerah rawan bencana banjir, merupakan suatu kegiatan pendataan daerah-daerah yang rentan dengan gejala bencana banjir yang berpotensi membahayakan masyarakat. Kegiatan ini sangat menunjang efektifitas dan efisiensi penyelamatan bila terjadi bencana banjir sewaktu-waktu yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten. Sebenarnya billboard ini baru sampai tahap rencana saja, karena pembuatannya baru akan dimulai pada tahun 2011 mendatang. Akan tetapi peta daerah rawan bencana banjir dan peta jalur evakuasi banjir telah selesai dibuat.

b. Media Elektronik berupa EWS (*Early Warning System*).

EWS (*Early Warning System*), BPBD bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung dalam rangka pemberian informasi tentang cuaca ekstrim yang mempunyai dampak kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana banjir. Bentuk penginformasian tersebut adalah EWS (*Early Warning System*), yang berupa penginformasian terjadinya suatu bencana ke masyarakat melalui SMS (*Short Message Service*). Dalam hal ini BMKG dibantu oleh jaringan Provider seperti Indosat dan Telkomsel.

BPBD Provinsi Lampung merupakan perubahan lembaga/ badan dari Sekertariat Bencana Provinsi Lampung. Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.14 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah pada Provinsi Lampung, dan baru diresmikan Februari 2010.

## **2. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Langkah selanjutnya adalah pengorganisasian atau proses pembagian kerja atau tugas dari kegiatan strategi komunikasi tersebut. Didalam proses pembagian kerja atau tugas ini, BPBD dan Satker membentuk PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) yang kemudian pada saat kegiatan tersebut akan dilaksanakan, maka dibentuklah panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari Ketua Pelaksana, Sekertaris, dan anggota. Disini juga ditentukan siapa saja yang akan menjadi pembicara dalam sosialisasi tersebut. Misalnya untuk masalah penginformasian tata cara penanggulangan bencana banjir, pembicaranya berasal dari BPBD, masalah penginformasian tentang cuaca ekstrim, pembicaranya dari BMKG, masalah pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan pembicaranya dari

Dinas Pertanian, masalah kesehatan pembicaranya dari Dinas Kesehatan, dan sebagainya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan, BPBD Provinsi Lampung hanya bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana banjir di lingkungan provinsi saja. Artinya untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi selanjutnya atau kegiatan sosialisasi di daerah kabupaten/kota telah menjadi tanggung jawab dari BPBD masing-masing Kabupaten/Kota.

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi cepat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana (Pasal 30, PP No 46 tahun 2008).

Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten/Kota terdiri atas 2 klasifikasi, yaitu Klasifikasi A dan Klasifikasi B. Klasifikasi A terdiri atas: Kepala pelaksana, Sekertariat Unsur Pelaksana, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sedangkan Klasifikasi B terdiri atas: Kepala pelaksana, Sekertariat Unsur Pelaksana, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, dan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

### **3. Pelaksanaan (*Actuating*)**

Langkah selanjutnya adalah penggerakkan atau pelaksanaan strategi komunikasi yang telah dirumuskan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi banjir ini adalah berupa penginformasian mengenai macam-

macam penyebab banjir, tata cara penanggulangan bencana banjir, tanya jawab, pelatihan atau simulasi kesiapsiagaan jika terjadi banjir, dan ajakan ke masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Sehingga, isi pesan dari kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana banjir ini tidak saja hanya berisi tentang mitigasi bencana banjir tetapi juga mengajak masyarakat ke arah yang lain misalnya mengenai kesejahteraan, keberlanjutan bidang lain (misalnya, perawatan dan pemanfaatan lahan kritis).

Pelaksanaan kegiatan ini sangatlah bermanfaat bagi semua pihak tidak terkecuali masyarakat, karena melalui kegiatan ini masyarakat jadi lebih sadar dan siap siaga dalam menghadapi kemungkinan situasi bencana banjir di masa yang akan datang. Sehingga secara tidak langsung dapat meminimalisir atau mengurangi resiko yang terjadi akibat bencana banjir. Karena didalam mengatasi bencana banjir yang terus-menerus seperti ini, tidak hanya pemerintah yang dituntut untuk bertanggung jawab dalam menanggulangnya, akan tetapi faktor terbesar adalah dari masyarakat sendiri. Perlu kesadaran yang besar bagi tiap-tiap individu dalam menjaga dan menyayangi lingkungannya.

Sosialisasi penanggulangan bencana banjir yang dilakukan BPBD Provinsi Lampung ini sifatnya hanya sebagai pengkoordinasian, artinya BPBD Provinsi Lampung hanya bertugas sebagai koordinator yang memberikan pengarahan, menetapkan pedoman, menetapkan standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir kepada pihak perwakilan BPBD Kabupaten/Kota dan *key persons* tersebut.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana banjir sampai akhirnya ke masyarakat merupakan tanggung jawab dari BPBD Kabupaten/Kota. Hal ini karena program kegiatan sosialisasi di masing-masing BPBD Kabupaten/Kota berbeda, tergantung dari kebijakan masing-masing BPBD Kabupaten/Kota tersebut. Selain itu, karena setiap daerah mempunyai karakteristik ancaman dan risiko banjir yang berbeda, sehingga perlu disusun suatu rencana di tingkat wilayah/daerah masing-masing agar penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan lebih efektif dan lebih terarah.

#### **4. Pengendalian (*Controlling*)**

Langkah terakhir dalam mengidentifikasi strategi komunikasi adalah pengendalian atau evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan. Tujuan utama fungsi pengendalian adalah, agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan standarnya. Pengendalian merupakan proses untuk membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dan standarnya, mengidentifikasi dan mengadakan analisis terhadap kemungkinan yang terjadi. Dengan kata lain, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui hasil, masalah, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Setelah itu dapat ditentukan, apakah strategi komunikasi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

Masalah atau hambatan yang dialami BPBD Provinsi Lampung didalam melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana banjir ini adalah :

1. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Rendahnya kualitas SDM dibidang penanggulangan bencana yang dimiliki, hal ini terlihat dari kurangnya orang atau pegawai BPBD Provinsi Lampung yang terampil dalam proses sosialisasi penanggulangan bencana banjir. Latar belakang pendidikan akan sangat mempengaruhi kinerja individu, rata-rata sumber daya manusia di BPBD Provinsi Lampung bukan berlatar pada pendidikan geologi atau geografi yang lebih menyangkut pada kegiatan penanggulangan bencana, tetapi justru berasal dari berbagai disiplin ilmu seperti: Sosial, Ekonomi, Pendidikan, dan Teknik. Dari data yang terurai diatas, secara keseluruhan ternyata terdapat banyak kekurangan tenaga kerja yang berdasarkan latar pendidikan, sehingga menyebabkan kurangnya tenaga yang berkualitas dibidang penanggulangan bencana.

## 2. Terbatasnya anggaran dan Fasilitas

Dalam menjalankan suatu kegiatan strategi komunikasi dibidang penanggulangan bencana tentunya dibutuhkan anggaran dana dan fasilitas yang memadai, akan tetapi dalam kenyataannya anggaran dana dan fasilitas di BPBD Provinsi Lampung masih terbilang kurang. Anggaran dana yang dimiliki BPBD Provinsi Lampung hanya dipakai dalam sosialisasi penanggulangan bencana ditingkat provinsi saja, sedangkan anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana banjir di tingkat kabupaten/kota telah menjadi tanggung jawab masing-masing kabupaten/kota.

Salah satu faktor penting lain yang dijadikan pertimbangan dalam evaluasi strategi komunikasi adalah respon masyarakat terhadap kegiatan strategi komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Lampung. Dalam mengidentifikasi respon publik,

biasanya BPBD Provinsi Lampung mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota yang diadakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Kegiatan rapat ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana banjir yang dilakukan BPBD Kabupaten/kota ke masyarakat. Sehingga dari hasil rapat tersebut dapat diketahui kegiatan sosialisasi apa saja yang telah dilakukan pada masing-masing BPBD Kabupaten/Kota, apakah pesan penanggulangan bencana banjir tersebut telah diterima oleh masyarakat atau belum, apa hambatan dan masalah yang ditemui, dan sebagainya.